

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam arena politik global, Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya atau *super power*. Mengutip dari Beckley (2018), Amerika Serikat memiliki kekuatan tersendiri dalam hal kekayaan dan kapabilitas militer, kedua aspek ini menjadi pilar kebangkitan Amerika Serikat sebagai negara *super power*. Kekuatan finansial memungkinkan negara untuk 'membeli' berbagai bentuk pengaruh, salah satunya melalui investasi, pinjaman, bantuan, dan pendanaan kegiatan yang bersifat *soft power* (Beckley, 2018, p. 10). Sedangkan kekuatan sumber daya militer (meliputi pasukan tentara dan persenjataan) memungkinkan suatu negara untuk membentuk aliansi, mengalahkan musuh, menawarkan perlindungan dan bantuan ke negara lain melalui ancaman kekerasan, dan mengambil konsesi.

Kekuatan ekonomi Amerika Serikat dibuktikan oleh nilai GDP yang telah sekian lama terus berada di tingkatan teratas, jika dibandingkan dengan negara lain. Per tahun 2022, nilai GDP dari Amerika Serikat sendiri menyentuh angka 100,88 Triliun dolar Amerika Serikat berdasarkan data Bank Dunia (2024). Kemudian, keberadaan dari mata uang dolar Amerika Serikat menjadi basis mata uang internasional yang sudah digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi pasca Perang Dunia 2 (Eichengreen, Mehl, dan Chitu, 2018). 2 Faktor ini menjadi indikator yang bisa digunakan untuk melegitimasi kekuatan ekonomi dari negara Amerika Serikat. Peranan internasional dari dolar Amerika Serikat, memungkinkan negara Amerika Serikat dan mata uangnya sendiri dapat menyediakan berbagai keuntungan untuk mereka gunakan, melalui batasan-batasan longgar yang membantu kekuatan politik, komersial dan pengaruh hegemoni Amerika Serikat (Norrlöf, 2014).

Kapabilitas Militer Amerika Serikat juga berada di kelas yang tinggi. Berkat dari kekuatan dan keuntungan ekonomi yang didapatkan hingga sekarang,

pengeluaran militer Amerika Serikat dari tahun 1988-2023 mencapai 29351,9 Miliar *USD* dengan rata-rata nilai transaksi per tahunnya di angka 815,3 Miliar *USD* (SIPRI, 2023). Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan pangkalan militer udara, laut, dan darat yang tersebar hampir di seluruh dunia, serta kehadiran kendaraan militer yang mencakup aspek-aspek sebelumnya. Juga dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu operasi-operasi militer yang telah dan/atau hingga sekarang masih berlangsung di dunia. Dengan kekuatan militer yang kuat, pengaruh untuk mengontrol ataupun menyuruh pihak-pihak yang berada dalam pengaruh Amerika Serikat, menjadi sangat efisien untuk digabungkan (Khong, 2019). Dengan populasi masif yang mencapai 339 juta jiwa (WorldOMeter, 2023), dan 1.3 juta jiwa masuk ke dalam pasukan militer per tahun 2018 (Council on Foreign Relations, 2020).

Dari dua poin tersebut, cukup untuk menjelaskan mengapa Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara adidaya. Beckley (2018) berpendapat bahwa kekayaan dan kapabilitas militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat merupakan pilar global yang membawa Amerika Serikat ke suatu tingkat tersendiri. Lalu, Jackson (2019) beropini bahwa *sphere of influence* berperan penting (dalam hal ini, julukan Amerika Serikat sebagai negara adidaya) untuk membangun citra yang kredibel bagi Amerika Serikat di mata komunitas internasional. Sehingga mengukuhkan reputasi Amerika Serikat sebagai negara yang konsisten dalam menepati janjinya melalui tindakan yang proaktif dalam berbagai dinamika global; seperti Perang Dunia, Perang Dingin, *Marshall Plan*, Promosi Demokrasi, dan bantuan-bantuan kemanusiaan.

Amerika Serikat melakukan banyak hal untuk tetap dapat mengontrol dinamika internal dan eksternal negara mereka. Amerika Serikat menggunakan model pemerintahan Federalisme. Robertson (2017) menjelaskan, sejarah Amerika Serikat sejak tahun 1787 diidentifikasi dengan munculnya berbagai partai politik yang mengadvokasi desentralisasi. Para penganut ide ini berpendapat bahwa wilayah-wilayah tertentu di negara Amerika Serikat akan lebih efektif dalam mengelola urusan mereka sendiri melalui kebijakan dan pemerintahan yang otonom, namun pemerintah federal tidak sepenuhnya melepaskan daerah otonom

ini sendirian, melainkan menyediakan bantuan dan kontrol terhadap stabilitas dan kesatuan nasional. Robertson (2017) kemudian menerangkan bahwa sistem federalisme menciptakan pemerintahan nasional Amerika Serikat yang dinamis, di mana politik adalah dasar dari arus kekuatan utama. Sistem ini menggunakan rakyat dan pihak mayoritas sebagai penentu kebijakan, namun “pihak mayoritas” tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dibangun dan diorganisir oleh pemimpin politik yang ada pada saat itu.

Dalam dunia politik internal Amerika Serikat ada beragam partai-partai politik, namun hanya ada 2 partai politik yang berkuasa, yaitu Partai Demokrat dan Republik (Zeidan, 2022). Partai lain, atau biasa disebut *Third Parties* oleh Baylor (2018), adalah Partai Hijau, Partai Libertarian, dan Partai independen. Pada sejarahnya, sebelum *Civil War* hingga *The Great Depression* terjadi di Amerika, Partai yang mendominasi dan “mewakili” Amerika hanyalah Partai Republik yang dulunya disebut sebagai Partai Abraham Lincoln (Baylor, 2018). Dan Baylor (2018) menjelaskan pula, bahwa keberadaan dari *Third Parties* sendiri, masih mengalami kesulitan untuk dapat berdampak dalam pemilihan umum yang ada serta pembentukan kebijakan, karena keberadaan mereka yang cenderung “kecil” di kursi pemerintahan dan atau di Masyarakat Amerika Serikat.

Dinamika internal Amerika Serikat cukup beragam mengenai politik dan kebijakan luar negeri mereka. Munculnya *democratic peace* yang mempengaruhi politik dan kebijakan luar negeri mulai dirasakan pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, yang digunakan juga untuk mendemokratisasi beberapa negara di Eropa bahkan negara eks Uni Soviet (Nursita dan Surwandono, 2017). Presiden selanjutnya George W. Bush menggunakan gagasan yang sama, untuk mengeluarkan Bush Doctrine sebagai dalilnya di dunia politik kebijakan luar negeri. Walaupun di pemerintahan Presiden Barack Obama tidak terlihat secara langsung bahwa politik dan kebijakan luar negerinya terinspirasi dari *Democratic Peace* (Nursita dan Surwandono, 2017), upaya demokratisasi tetap terlihat di studi kasus yang sedang dibahas penulis saat ini, yaitu intervensi militer di Libya pada tahun 2011. Upaya implementasi *Democratic Peace* pada masa pemerintahan Obama tidak hanya terjadi ke Libya, namun juga terjadi di Suriah. Kedua negara

tersebut karena dipimpin oleh pemimpin otoriter Gaddafi dan Assad yang sudah berkepanjangan masa pemerintahannya, menjadi objek untuk melakukan demokratisasi (Nursita dan Surwandono, 2017).

Pada tahun intervensi militer di Libya terjadi, Amerika berada dalam masa pemerintahan periode pertama dari Barack Obama (Kenski, Hardy dan Jamieson, 2010). Di dalam dinamikanya, Obama mencoba menjalankan kebijakan luar negeri dengan konsep yang beraneka ragam. Salah satunya adalah dengan melakukan diplomasi dan dialog, sebagai salah satu instrumen utama mereka dalam berinteraksi dengan negara-negara lain (Ikenberry et al., 2016). Obama mencoba untuk mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari yang berfokus pada satu pihak (unilateralis) menjadi diplomasi dan dialog. Sehubungan dengan hal ini, kebijakan luar negeri Obama dapat dilihat dengan jelas melalui beberapa upaya yang menggambarkan perubahan itu.

Intervensi militer di Libya pada tahun 2011, di bawah arahan PBB dalam koalisi internasional, memperlihatkan dedikasi Obama untuk bekerjasama dengan negara-negara lain untuk mencoba mengamankan dan melindungi permasalahan kemanusiaan (Hanania, 2021). Di lain hal, usaha Obama untuk berhubungan diplomatik dengan negara Iran yang setelah sekian lama mengalami hambatan signifikan pun, dapat berakhir dengan kesepakatan nuklir '*Joint Comprehensive Plan of Action*' (JCPOA) pada tahun 2015 (Unger, 2016). Mencerminkan usaha Obama yang berkeyakinan dengan konsep dialog dapat menjadi solusi jangka panjang. Kemudian, penarikan pasukan militer Amerika Serikat di Irak pada tahun 2011, mempertegas niat Obama untuk menyelesaikan keterlibatan militer yang telah lama berjalan dan kemudian bertransisi ke upaya diplomatik (Hanania, 2021). Di Afghanistan, meskipun Obama masih mengusung strategi jangka pendek untuk meningkatkan jumlah pasukan, Obama tetap berencana untuk melakukan pengurangan secara gradual, kembali menekankan niatnya untuk mencoba menyelesaikan masalah yang ada dengan diplomasi untuk mencari resolusi (Hanania, 2021). Maka dari itu, kebijakan luar negeri Obama berupaya menyatukan prinsip diplomasi, kerja sama internasional, dan pengurangan

keterikatan pada kekuatan militer, mengilustrasikan bahwa Amerika Serikat sedang mengatur strategi di panggung global secara riil.

Libya mengalami konflik nasional yang awalnya dipicu oleh demonstrasi kepada Gaddafi dimana terdapat beberapa kelompok yang menuntut kemunduran Gaddafi dari kursi kepemimpinannya gelombang demonstrasi yang besar di perkeruh dengan adanya penembakan yang dilakukan oleh tentara Libya kepada para demonstran dimana menimbulkan korban tewas lebih dari 100 orang dalam kurun waktu empat hari, dimana demonstrasi tersebut terjadi di Benghazi (Adetunji, Beaumont and Chulov, 2011). Dampak dari besarnya gelombang demonstrasi dan timbulnya korban jiwa tersebut berdampak pada berubahnya kondisi nasional Libya menjadi situasi konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dampak dari adanya korban jiwa dengan jumlah yang besar tersebut dan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin meluas tersebut memicu respon dunia internasional terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Libya sehingga kondisi tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan. Melalui Resolusi 1970 dan 1973, Dimana pada akhirnya dewan Keamanan PBB memberikan mandat untuk melakukan intervensi militer guna melindungi warga sipil dan mengakhiri kekerasan yang terjadi di Libya (United Nations, 2011).

Amerika berperan sebagai inisiator dan juga eksekutor di konflik Libya. Konflik yang berjalan ini bisa dikategorikan sebagai salah satu Perang Liberal ofensif motif geopolitik dan kemanusiaan (Milevski, 2020). Sebelum memutuskan untuk intervensi secara langsung, Amerika telah berkomunikasi dan berdiskusi dengan PBB dan NATO, yang kemudian dengan mandat Dewan Keamanan PBB (melalui resolusi 1973), Amerika dan Sekutu pada kala itu dapat berinterferensi secara langsung per Maret 2011 (Wrage and Cooper, 2019). Wrage dan Cooper (2019) menjelaskan bahwa peranan masing-masing negara berbeda-beda. Amerika melalui Operation Odyssey Down, NATO dan Eropa membantu di sektor udara, dan negara-negara Arab membantu logistik. Hasil akhir dari campur tangan Amerika dan Sekutu yang sudah dijalankan ini, masih menimbulkan pertanyaan

mengenai legitimasinya karena pasca kejadian ini usai, perubahan rezim terjadi (Zambakari, 2016).

### **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Mengapa terjadi kontradiksi pendekatan democratic peace Amerika Serikat saat melakukan intervensi militer di Libya pada tahun 2011?

### **1.3 Batasan Penelitian**

Adanya pembatasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya pelebaran isu yang sedang diteliti, serta membantu dan mempermudah peneliti untuk menjelaskan isu terkait hanya pada saat itu saja. Sehingga pembatasan penelitian ini membantu mewujudkan efisiensi dalam waktu, biaya, dan sumber daya yang digunakan, sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. Adapun batasan yang dilakukan antara lain:

1. Sejarah dari dinamika Idealisme "Democratic Peace" Amerika Serikat
2. Presiden dan seluruh aktor pemerintah, maupun aktor lainnya yang sedang menjabat di pemerintahan pada periode tersebut.
3. Pra, saat, dan pasca intervensi militer Amerika di Libya (Februari - Oktober 2011). Anomali yang terjadi adalah disaat Amerika Serikat melakukan intervensi militer tersebut. Intensinya melakukan intervensi militer, bertolak belakang dengan upaya yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat, yaitu perlindungan HAM. Tujuan yang ingin dicapai ini bertolak belakang dengan sikap yang dilakukan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis alasan mengapa Amerika Serikat tetap melakukan intervensi militer
2. Untuk menganalisis proses intervensi militer dari perspektif democratic peace dan rational choice theory

3. Untuk menganalisis sifat Amerika Serikat saat melaksanakan intervensi militer di Libya

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian yang disusun yaitu:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Mampu memberikan kontribusi kepada cabang keilmuan HI di bidang Democratic Peace untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait penerapan nilai-nilai ideal dari Democratic Peace dengan berbagai dinamika yang dapat terjadi dalam proses pengimplementasiannya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan pertimbangan atau penentu nilai-nilai ideal dari Democratic Peace yang nantinya akan diterapkan.

## **1.6 Sistematika Penulisan Penelitian**

Dalam proses penyusunan skripsi ini untuk memperoleh sebuah hasil yang terstruktur dan sistematis sehingga pembaca mampu menerima dan membaca dengan baik, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** merupakan bagian awal dari sebuah penulisan dimana bab satu ini berisi terkait latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** berisi mengenai penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan atau pedoman yang didalamnya berisi sumber-sumber data yang mendukung penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga memuat mengenai landasan teoritis yang berguna sebagai data pendukung untuk membuat penelitian ini menjadi penelitian yang sesuai dalam proses mengaitkan antara teori dalam bidang HI dengan fenomena studi kasus yang ada.

Serta pada bab ini terdapat kerangka pemikiran yang berguna untuk mempermudah dalam proses pemahaman secara lebih rinci dan terstruktur terkait apa saja yang akan penulis sampaikan dalam penelitian ini.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN:** berisi mengenai metode penelitian yang digunakan, dengan memberikan penjelasan terkait penelitian yang digunakan, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data yang digunakan, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan, analisis data yang terkumpul dan validasi data yang digunakan.

**BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN:** berisi mengenai inti dari penelitian yang telah dilakukan, dimana akan menjelaskan secara rinci terkait Motivasi Intervensi Militer Amerika Serikat ke Libya tahun 2011: Perspektif Democratic Peace.

**BAB V PENUTUP:** merupakan bagian terakhir pada penelitian ini sehingga, berisi terkait rangkuman materi yang telah menyimpulkan secara keseluruhan dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Serta terdapat saran yang berguna untuk meneliti secara lebih lanjut terkait studi kasus yang telah diangkat.